

Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Sukoharjo

Anisa Dwi Angraini¹, An'nissa Ita Yulianti², Denofata Swastikasari³, Lulu Fitriana Laela⁴, Sarah Fadila⁵, Windi Shilvia Puspitasari⁶, Aris Prio Agus Santoso⁷, Bangun Prajadi Cipto Utomo⁸

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Jalan Pinang No. 47, Jati, Cemani, Sukoharjo, 57552

e-mail : ¹dwianggrainiana66@gmail.com, ²annissa21@gmail.com, ³denofata2002@gmail.com, ⁴210414041@mhs.udb.ac.id, ⁵210414051@mhs.udb.ac.id, ⁶shilvia0206@gmail.com, ⁷arisprio_santoso@udb.ac.id

Abstract— During the Covid 19 pandemic in Indonesia, it has weakened various sectors of life in society, including the economic sector. Various policy efforts have been carried out by the government to deal with the covid 19 virus outbreak, one of which is the government implementing PPKM level 4. People in the lower middle class such as street vendors really feel the impact that occurred because of this policy most of the street vendors experienced a drastic decrease in turnover due to the PPKM period with strict rules so that community activities were very limited and made traders hampered in the trading process. The formulation of the problem used in this study is to determine the impact caused during the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) level 4 in Sukoharjo. One of the objectives of this study was to determine the impact of level 4 Community Activity Restrictions (PPKM) on street vendors, especially in the Sukoharjo area. The method used in this study uses a case study approach with data collection sourced from primary data. The data obtained were analyzed qualitatively. Sources of data in this study are the results of questionnaires to the public and the results of interviews from Mr. Suraji as a basic necessities trader, Mrs. Wiji as a kebab seller, and Mr. Afthon as a Labmilk trader in Gentan. The results showed that PPKM level 4 had an impact including: (1) a very significant decrease in turnover; (2) consumers are starting to switch to online shopping instead of offline shopping; (3) unequal government assistance to merchants I.

Keywords—: PPKM level 4; Covid-19; Street vendors; Government.

I. PENDAHULUAN

Semua Negara diseluruh belahan dunia kini sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Tak terkecuali negara kita yaitu Indonesia, Indonesia kini kondisinya sangat memprihatinkan. Pemerintah Indonesia bahkan sudah menyatakan virus ini sebagai bencana non alam atau pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang telah menghantam industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Tidak main-main dampaknya, sejak Februari 2020 semua aspek kehidupan terkendala karena virus Covid-19. Dibidang Ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan cepat bergerak membentuk kebijakan dan peraturan demi memerangi pandemi Covid-19. Ini dilakukan karena melihat posisi negara Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara yang terdampak penularan Covid-19. Dan mengingat jumlah angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik penyebaran virus ini semakin meningkat terus menerus.

Perkembangan Covid-19 di Indonesia, sampai saat ini masih meningkat jumlahnya. Akibat virus Covid-19 menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat ke berbagai Negara. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus Covid-19 yaitu pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan berupa PSBB (Pemberantasan Sosial Berskala Besar), lock down, social distancing, new normal, mentaati protokol kesehatan dan kebijakan lainnya

Kebijakan ini membawa dampak semakin terpuruknya kondisi ekonomi Indonesia dan dampak lainnya yang bersifat multidimensional yang artinya permasalahan lebih dari satu. Menyadari kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi pandemi Covid-19, pada pertengahan Februari 2021 pemerintah mulai melaksanakan kebijakan yang disebut dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro serta mengupayakan vaksin massal kepada seluruh warga masyarakat secara bertahap di seluruh Indonesia peraturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Mendagri No.41 2020.

Dalam mengatasi penyebaran Covid-19 yang sampai saat ini masih terus meningkat, pada tingkat desa dan kelurahan. Mengoptimalkan pembatasan kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sampai kepada tingkat desa/kelurahan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan dan menaati protokol kesehatan, social distancing serta pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro.

Semenjak berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat level 4 untuk wilayah Jawa-Bali pada 3 Juli 2021 dan dikabarkan akan diperpanjang hingga 6 minggu. Imbas dari angka kasus yang semakin hari semakin meningkat, hal ini berdampak kepada perusahaan hingga pedagang kaki lima. Semenjak covid-19 menyerang Indonesia tentunya

banyak sektor yang dirugikan. Banyak keluhan yang dikeluarkan oleh para pedagang besar maupun pedagang kecil contohnya pedagang kaki lima, sebagian ada yang terpaksa untuk menutup usahanya dan sebagian ada yang terpaksa untuk tetap berjualan meskipun resiko yang dihadapi besar.

Aturan yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat level 4, level 3, dan level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Salah satu aturannya berbunyi bahwa Warung makan/Warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 orang dan waktu makan maksimal 30 menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh Pemerintah Daerah. Hal ini sangat merugikan khususnya bagi pelaku ekonomi kecil.

II. KAJIAN TEORITIS

Penyakit virus corona (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis.

Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang sifatnya terbatas terkait kekuasaan. Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu Negara atau badan tertinggi pada suatu Negara dan sebagainya.

PPKM Level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian. Pemerintah memperpanjang PPKM level 2-4 di Jawa dan Bali hingga 30 Agustus mendatang. Sejumlah daerah sudah menurun dari level 4 ke 3 dan ada yang level 2. Di antaranya yang masih bertahan di zona PPKM Level 4 adalah kawasan aglomerasi Solo Raya. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, tercatat di Jateng ada 15 daerah masuk PPKM Level 4, kemudian 18 daerah masuk level 3, dan ada 2 daerah masuk level 2, berikut daftarnya:

Level 4:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Kabupaten Boyolali | 9. Kota Surakarta/Solo |
| 2. Kabupaten Purbalingga | 10. Kota Salatiga |
| 3. Kabupaten Wonogiri | 11. Kota Magelang |
| 4. Kabupaten Sukoharjo | 12. Kabupaten Sragen |
| 5. Kabupaten Klaten | 13. Kabupaten Purworejo |
| 6. Kabupaten Kebumen | 14. Kabupaten Cilacap |
| 7. Kabupaten Banyumas | 15. Kabupaten Karanganyar |
| 8. Kota Tegal | |

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaga dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (pedestrian). Tetapi menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro yang menempati fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perorangan yang telah mendapatkan izin.

III. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana dampak yang ditimbulkan selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 terhadap pedagang kaki lima khususnya daerah Sukoharjo?

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan *case study*. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara bersama Bapak Suraji selaku penjual kebutuhan pokok dipasar Cemani, Ibu Wiji selaku penjual kebab, Bapak Afthon selaku penjual Labmilk di Gentan dan beberapa narasumber lainnya serta menggunakan *google form* untuk kuisioner kepada narasumber. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 terhadap pedagang kaki lima khususnya daerah Sukoharjo.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara dengan Bapak Suraji selaku penjual kebutuhan pokok dipasar Cemani:

1. Cara bertahan agar tetap berjualan di saat kebijakan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di masa pandemi covid 19 seperti ini yakni dengan cara yang sama seperti biasanya karena toko kebutuhan pokok tetap diizinkan buka, hanya pada saat belanja stok barang dikurangi kuantitasnya. Menurut bapak Suraji penurunan terhadap stok barang juga ada akan tetapi tidak terlalu signifikan karena dari awal pppm pun bapak Suraji sudah membatasi kuantitas penyetokan barangnya.

2. Untuk penurunan persentase penjualan dimasa PPKM sangatlah jauh dibandingkan sebelum pandemi covid ini melanda sekitar di angka 40-60%. Jumlah pengunjung sangat menurun drastis dibandingkan 2019 lalu saat belum ada covid 19 serta pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di pasar cemari biasanya pagi-pagi sekali sudah sangat ramai pengunjung akan tetapi saat covid 19 menyerang dan diberlakukannya PPKM level 4, banyak pembeli yang beralih kepada pasar online yang lebih meminimalisasi kerumunan sehingga pasar tradisional mulai sepi pengunjung. Dan untuk omzet yang turun selama PPKM ini cukup jauh karena presentase jumlah penurunan pelanggan pun juga menurun drastis maka sangat mempengaruhi jumlah penghasilan yang awalnya Rp 1.500.000,00 – Rp 2.500.000,00 menjadi sekitar Rp 400.000,00 – Rp 800.000,00.
3. Untuk bantuan pemerintah kepada pedagang ada beberapa bantuan pemerintah seperti bantuan UMKM uang tunai sejumlah Rp 2.400.000,00 dan itu tidak hanya sekali tapi bertahap, ada sedikit perubahan juga menjadi Rp 1.200.000,00 diberikan secara berkala.
4. Dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 menurut bapak Suraji nyatanya sangat efektif untuk menekan jumlah covid di indonesia, karena setelah kebijakan ini usai kondisi pasar pun mulai kembali sedikit memulih. Bapak Suraji berharap covid ini segera berlalu sehingga kondisi pasar bisa kembali normal sama seperti ditahun sebelum adanya covid.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Wiji selaku penjual Kebab :

1. Selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 ada aturan dimana pembatasan untuk berjualan pada jam malam yang harus selesai pada pukul 20.00 WIB. Untuk menyasati hal itu, ibu Wiji dari yang awalnya buka pukul 16.00 WIB maju menjadi satu jam lebih awal pada pukul 15.00 WIB dan tutup lapak yang awalnya pukul 21.30 WIB menjadi 20.15 WIB. Jika idak ada patroli dari satpol PP, ibu Wiji tetap membuka lapaknya hingga pukul 21.30 WIB namun, jika suara sirine mulai terdengar langkah yang diambil ibu Wiji bertahan untuk tetap berjualan dengan mematikan lampu pada lapak seakan akan kebab sudah tutup. Jika satpol PP sudah pergi ibu Wiji kembali membuka lapaknya.
2. Untuk berapa persen penurunan penjualan itu kira-kira sebesar 30% dibandingkan sebelum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4
3. Tidak ada bantuan yang didapatkan ibu Wiji selama berjualan pada masa PPKM level 4
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 terhadap penjualan kebab sendiri cukup memberikan dampak, sebagian besar pelanggan mulai enggan keluar untuk sekedar mampir membeli makan mereka lebih memilih untuk memesan *go-food* ataupun makanan pesan antar yang lainnya. Hal ini tentu berdampak bagi penghasilan kebab, dimana lapak kebab yang menjadi tempat kerja ibu Wiji tidak memiliki layanan pesan antar.
5. Dampak terhadap stok barang terhadap lapak kebab diantaranya ada beberapa varian selain kebab yaitu ada burger dan hotdog untuk varian burger dan hotdog dalam waktu 2-3 hari rotinya habis namun, selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 mencapai 8 hari bahkan menjamur karena penurunan pelanggan yang drastis, kemudian kulit kebab yang awalnya stok 50 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hanya stok 10, untuk sayuran yang biasanya bervariasi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hanya disediakan satu jenis saja, untuk dagingnya yang awalnya 1 kg mulai dikurangi kuantitasnya. Semua itu berpengaruh semenjak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diberlakukan dan itu sangat merugikan pedagang kecil.
6. Harapan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, ibu Wiji, Pemerintah diharapkan memikirkan sektor pedagang kecil karena berdampak kepada kehidupan sehari-hari dengan harga pangan yang semakin naik drastis. Pemerintah dapat memberikan kelonggaran bagi sektor pedagang kaki lima seperti *take away* untuk jam buka lapak dapat diperpanjang, untuk konsumen yang makan ditempat dapat dibatasi dengan memenuhi protokol kesehatan serta waktu makan ditempat dibatasi paling tidak 15 menit dengan menjaga jarak.

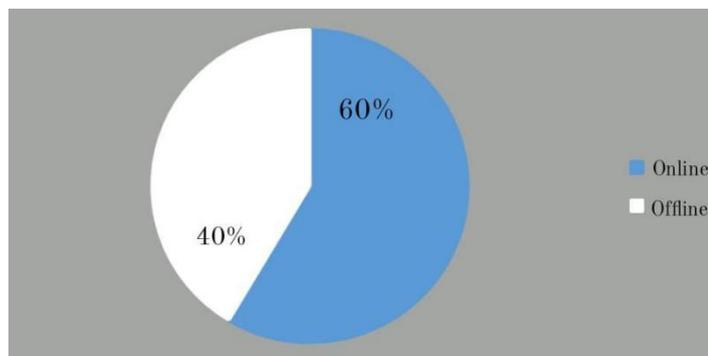
Hasil Wawancara dengan Bapak Afthon selaku pedagang Labmilk di Gentan :

1. Tentunya dengan keadaan yang semakin mengancam yang tidak mungkin orang diperbolehkan keluar membuat dilema para pedagang dari pedagang menengah keatas sampai menengah ke mikro. Dilemanya ketika memaksa untuk berdagang dipinggir jalan ataupun stand tentu tidak ada yang datang untuk membeli produk yang di dagangkan. Akan tetapi dari peraturan pemerintah juga direvisi kembali kemudian diperbolehkannya berdagang dengan batasan waktu. Disitulah kesempatan kita untuk terus mengupayakan bagaimana dagangan tetap terjual, mungkin bisa dari berbagai cara, pertama masalah dalam internal dengan mengurangi jumlah pegawai/karyawan sehingga menipiskan beban pengeluaran, kemudian ada posisi dimana kita sendiri yang handle posisi terpenting itu hingga posisi yg lainnya yang menurut kita mampu.
2. Penurunan sekitar 60% dikarenakan pelanggan lebih membutuhkan kebutuhan primer daripada membeli kebutuhan sekunder
3. Bantuan yang didapat dari pemerintah berupa BPUM Rp 1.200.000,00 juta tetapi hanya sekali dapat
4. Salah satu kebijakan pemerintah dari jam operasional PPKM level 4 yang ditetapkan, menurut saya pribadi banyak kekurangannya, perlu adanya revisi kembali jam operasional mengingat para pedagang tidak semuanya berdagang dari jam operasional standar dari pagi sampai malam, terkadang ada yang buka dari sore hingga larut malam atau bahkan

sampai jam 3 dini hari, kemudian itu bertentangan dengan peraturan kebijakan pemerintah daerah operasional jam hanya sampai pukul 19.00 – 20.00 malam.

5. Penanganan covid 19 terutama dalam dana bantuan covid 19 perlu adanya upaya dan pengawasan, upaya untuk penanggulangan virus dan pengawasan untuk dana serta keadilan untuk kebijakan PPKM ini.
6. Untuk masalah stok harus dalam keadaan terkontrol artinya dimasa PPKM level 4, sebisa mungkin menjual barang dan harus ada income dari stok barang tersebut, yang terpenting kita memilih untuk mendapatkan income supaya bisa bertahan survival dalam hidup. Rugi itu suatu resiko tetapi jangan sampai kehabisan income.

Hasil Kuisisioner *google form* yang dibagikan kepada masyarakat menunjukkan hasil



Gambar 1. Grafik tingkat kepuasan masyarakat dalam berbelanja

Pada data kuisisioner di atas menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat dalam belanja online atau offline di masa pandemi Covid-19. Masyarakat lebih terfokus belanja online dikarenakan dengan melakukan belanja online berarti mereka telah menerapkan protokol kesehatan. Menurut data di atas belanja online berada pada 60% dan 40% pada belanja offline mengalami perbandingan yang cukup signifikan. Mayoritas masyarakat lebih banyak memilih berbelanja online dikarenakan lebih aman pada saat pandemi sekarang ini dan merupakan salah satu bagian dari protokol kesehatan yang harus di terapkan demi menjaga keselamatan bersama dengan selalu menjaga jarak atau *social distancing*. Jika masyarakat melakukan belanja secara offline, hal ini cenderung ditakutkan oleh beberapa orang karena dapat menyebabkan kerumunan. Hal ini sebaiknya tidak dilakukan untuk menghindari terpaparnya virus Covid-19.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara beberapa narasumber, antara lain :

1. Di masa pandemi Covid-19 serta pemerintah mulai menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 beberapa pedagang kaki lima mengalami penurunan jumlah pelanggan sekitar 30-60% hal ini berdampak pada turunnya angka penghasilan dan jumlah stok barang yang dijual dibandingkan tahun sebelum adanya Covid-19 dan PPKM level 4.
2. Pelanggan mulai berminat berbelanja di toko online dibandingkan pasar tradisional ataupun lebih memilih memesan makanan pesan antar dibandingkan datang langsung ke lapak tempat berjualan.
3. Kurangnya pemerataan bantuan pada pedagang kaki lima di daerah Sukoharjo, hal ini berdampak kepada pedagang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Fadli Ilyas, 2021, *Analisis Swot Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19*. Jurnal Akrab Juara (Tanggal 30 November 2021)
- Cindi Pramita, dkk., 2021, *Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang-Pedagang Kecil di Kantin Universitas Indo Global Mandiri Palembang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Tanggal 30 November 2021)
- Mariatul Khipitia Agis Aderovic, 2021, *Upaya Pemulihan Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah selama PPKM*. (Tanggal 30 November 2021)
- Ni Nyoman Pujaningsih, I.G.A.AG., & Dewi Sucitawathi P, 2020, *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar*. (Tanggal 30 November 2021)
- Ulung Napitu, dkk., 2020, *Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kelurahan Bah Kapul*. Jurnal Pengabdian Masyarakat (Tanggal 30 November 2021)

- Munirah Munirah, dkk., 2021, *Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Bangun Rumah Singgah di Dalapuli Bolaang Mongondow Utara*. Jurnal Pengabdian Ilmiah (Tanggal 15 Desember 2021)
- Widia Dwi Rahmawati & Agus Mahcfud Fauzi, 2021, *Perebutan Ruang Publik Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi di Alun-Alun Jombang*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial (Tanggal 15 Desember 2021)
- Rezky Yayang Yakhamid & Naufal Abdul Rafi Zaqi, 2021, *Efektivitas PPKM Darurat Dalam Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19 (Studi Kasus 128 Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali)*. (Tanggal 17 Desember 2021)
- Urip Giyono, 2021, *Studi Kasus Kebijakan Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah dalam Kajian Hukum Bisnis*. Jurnal Jendela Hukum (Tanggal 24 Desember 2021)
- I Nyoman Sunarta, 2021, *Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi COVID-19 Di Kota Denpasar*. (Tanggal 25 Desember 2021)
- Reny Nuraeny, dkk., 2021, *Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen*. (Tanggal 31 Desember 2021)
- Meti Mediyastuti Sofyan, dkk., 2021, *Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung*. (Tanggal 31 Desember 2021)